

FLYPAPER EFFECT PADA PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP
BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

FLYPAPER EFFECT ON THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS AND
OWN-SOURCE REVENUES ON REGIONAL SPENDING ON REGENCY / CITY IN ACEH PROVINCE

NURUL IKHWANI

Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
(machfud@gmail.com)

NAZ'AINA

Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
(nazaina@unimal.ac.id)

RATNA

Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh
(ratna@unimal.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Data penelitian yang digunakan adalah gabungan antara cross section dengan time series pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama 2013-2018, yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pengelola Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu). Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel dengan Bantuan Eviews 10. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Besarnya pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 92,07% dan sisanya sebesar 7,93% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terjadi flypaper effect pada DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dan pada DAK flypaper effect hanya terjadi di sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, ini dilihat dari kontribusi DAU dan DAK yang lebih tinggi dibandingkan PAD dalam merespon belanja daerah. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk menggunkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebaik dan seefektif mungkin, dan diharapkan pihak pemerintah daerah lebih menggali potensi-potensi daerah agar dapat meningkatkan PAD

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of general allocation funds, special allocation funds and own-source revenues on regional spending. The research data used is a combination of cross section with time series in 23 regencies/cities in Aceh Province during 2013-2018, obtained from the Budget Realization Report (LRA) issued by the Directorate General of Regional Financial Management of the Ministry of Finance (DJPK Ministry of Finance). The data analysis method used is Panel Data Regression with the help of Eviews 10. The results of this study prove that general allocation funds, special allocation funds and own-source revenues have a positive and significant effect on regional spending. The magnitude of the effect of general allocation funds, special allocation funds and local original income on regional expenditure is 92.07% and the remaining 7.93% is influenced by other variables outside this research model. This study also proves that there is a flypaper effect on the General Allocation Fund Regencies/Cities in Aceh Province and the Special Allocation Fund flypaper effect only occur in some districts / cities in Aceh Province, this is seen from the contribution of General Allocation Fund and Special Allocation Fund which is higher than own-source revenues in responding to regional spending. Recommendations from the results of this study are expected that the district / city local government in Aceh Province to use general allocation funds and special allocation funds as best and as effectively as possible, and it is hoped that the regional government will explore more local potentials in order to increase

Keywords : General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Own-Source Revenue, Regional Spending

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah otonomi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang kebijakan pemerintah daerah dan desentralisasi fiskal, agar daerah dapat mengurus

sendiri urusan pemerintah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didukung pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa respon dilakukannya otonomi daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah agar dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan dalam mengemban urusan tersebut lebih banyak dibanding sebelum otonomi. Namun pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana utama.

Belanja daerah merupakan komponen penting yang selalu mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (public fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Sesuai penelitian yang pernah dilakukan oleh Ferreiro (2009), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada awalnya harus dianalisis berdasarkan pengeluaran fungsional. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan identifikasi kegiatan mana yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Simanjuntak et al (2013), menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Selanjutnya, belanja daerah juga menjadi aspek yang penting dalam otonomi daerah. Daerah otonom yang baik merupakan daerah yang mampu melakukan investasi yang tepat dengan belanja daerah yang dianggarkannya (Koswara, 2001). Sementara itu, Afrizawati (2012) berpendapat bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran regional pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, serta urusan yang penyelesaiannya dalam aspek tertentu yang bisa dijalankan bersama-sama antara pemerintah sentral dengan pemerintah regional ataupun antara pemerintah regional. Ini menunjukkan bahwa belanja daerah menjadi aspek yang penting bagi suatu pemerintah daerah, termasuk daerah Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemberian otonomi khusus ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dimana Provinsi Aceh masih tergolong tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan 3 tahun 2019 hanya sebesar 3,76%, berada di bawah perekonomian nasional yang telah berhasil mencapai 5,02%. Hal tersebut terjadi dikarenakan Aceh belum begitu berkembang dan masih sangat bergantung pada realisasi APBA maupun APBK (BPS, 2019). Rendahnya pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan tingkat kemiskinan di Aceh, dimana BPS juga merilis bahwa Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera (urutan ke 6 Nasional) di tahun 2019, dan hal tersebut terjadi 3 kali berturut-turut. Selanjutnya, beberapa studi sebelumnya juga telah membuktikan bahwa tingkat flypaper effect di Aceh begitu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Aceh (Suyanto, 2015; Haryani, 2017; Zulfan & Mustika, 2018). Dalam studi Azwar et al. (2013) juga menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh masih belum begitu merata, dimana masih terdapat beberapa daerah yang sangat tertinggal sehingga terjadi kesenjangan perekonomian dengan daerah lainnya. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa Aceh masih menjadi daerah yang mengalami flypaper effect dari waktu ke waktu, sehingga menarik untuk dilihat kembali.

Flypaper Effect merupakan kondisi dimana pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer pusat dibandingkan dengan dana pendapatan asli daerahnya (Maimunah, 2006). Pengujian flypaper effect sendiri dilakukan dengan melihat pengaruh dana transfer pusat (yang dapat diprosikan dengan DAU dan DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerahnya (Kusumadewi & Rahman, 2007; Junaidi, 2012; Inayati, 2014; Suyanto, 2015; Haryani, 2017; Zulfan & Mustika, 2018), dimana riset-riset tersebut mengungkapkan bahwa ketika DAU ataupun DAK memberikan slope atau koefisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan PAD terhadap belanja daerah, maka flypaper effect di daerah tersebut memang terjadi.

Riset-riset sebelumnya membuktikan bahwa DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Magawal, 2013; Mulyati & Yusriadi, 2017; Syamni & Ichsan, 2018; Rasyid, 2018; Ferdiansyah et al., 2018; Anwar et al., 2018). Akan tetapi, beberapa studi lainnya mendokumentasikan hasil yang kontradiktif, dimana faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (Putra & Dwirandra, 2015; Ernayani, 2017; Rasyid, 2018; Indiransyah, 2017). Ini menunjukkan bahwa pengaruh DAU, DAK dan PAD terhadap belanja daerah masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya kembali.

LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESTS

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

DAU dapat diartikan sebagai dana transfer pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dengan potensi daerah (fiscal capacity). DAU berfungsi dalam menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Ferdiansyah et al., 2018). Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut menjadi penyerahan kewenangan dari pihak pemerintah pusat kepada pihak pemerintah daerah (Hapid et al., 2015). Pemerintah daerah dapat dengan leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dengan anggaran belanja daerah (Hairiyah et al., 2017). Uraian tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sebagaimana telah dibuktikan oleh riset-riset sebelumnya (Rasyid, 2018; Ernaya, 2017; Putra & Dwirandra, 2018)

Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diberikan oleh pemerintah pusat kepada pihak pemerintah daerah dengan tujuan mendanai kegiatan-kegiatan daerah yang memiliki sifat khusus, namun menjadi prioritas nasional (pusat). UU Nomor 33 Tahun 2004 mendokumentasikan bahwa kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain. Di beberapa daerah, peran DAK sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh DAK dibandingkan dengan PAD (Nailufar & Safitrayati, 2019).

Beberapa studi sebelumnya telah membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Kajian yang dilakukan oleh Syamni & Ichsan (2018) di Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Aceh mendokumentasikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Ferdiansyah et al. (2018) menemukan bahwa menemukan bahwa peningkatan DAK mempengaruhi peningkatan belanja daerah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Dalam menjalankan desentralisasi wilayah, pihak pemerintah daerah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan PAD dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah dengan tujuan dapat membiayai belanja daerah melalui pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana yang ada di daerah tersebut (Wandira, 2013). Peningkatan PAD juga mendorong naiknya pengalokasian pada belanja daerah kabupaten/kota (Simanjuntak et al., 2013).

Beberapa riset sebelumnya juga telah menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Mawarini et al. (2013) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Syamni & Ichsan (2018) menemukan bahwa PAD dapat meningkatkan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Magowan (2013) juga mendokumentasikan hasil yang sama di Provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, yang artinya peningkatan PAD akan berdampak terhadap peningkatan belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
- H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

METODE

Objek dalam penelitian ini adalah DAU, DAK, PAD dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2013-2018 yaitu sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilakukan dengan mengakses situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) yang diakses melalui situs resmi yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa data Panel (pooled data) adalah data gabungan antara time series data dengan cross section data. Dikatakan data gabungan karena data ini terdiri atas beberapa objek dalam beberapa periode waktu. Periode dalam penelitian ini selama selama 2013-2018 (time series) dan objek sebanyak 23 Kabupaten/Kota (Cross Section) sehingga banyaknya observasi dalam penelitian ini adalah 184 observasi.

Penelitian ini secara umum menggunakan 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah yang diukur dengan satuan full Rupiah. Sementara itu, variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari DAU yang diukur dalam satuan Rupiah, DAK diukur dengan satuan Rupiah, dan PAD diukur dengan satuan Rupiah.

Adapun persamaan statistik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LnBDit} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnDAUit} + \beta_2 \text{LnDAKit} + \beta_3 \text{LnPADit} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- β_0 : Konstanta
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien
 LnBDit : Nilai Logaritma Natural dari Belanja Daerah Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh selama 2013-2018
 LnDAUit : Nilai Logaritma Natural dari Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Provinsi Aceh selama 2013-2018
 LnDAKit : Nilai Logaritma Natural dari Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Aceh selama 2013-2018
 LnPADit : Nilai Logaritma Natural dari Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh selama 2013-2018
 ϵ_{it} : Error Term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Statistik

Pada analisis statistik deskriptif, akan terlihat bagaimana nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Analisis Deskriptif Statistik (dalam Jutaan Rupiah)

	Mean	SD	Max	Min	Obs
BD	1,080,000	462,000	2,710,000	341,000	138
DAU	527,000	149,000	872,000	252,000	138
DAK	128,000	91,400	397,000	27,300	138
PAD	104,000	91,900	738,000	8,290	138

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata belanja daerah dalam penelitian ini sebesar Rp 1,080,000 dengan nilai standar deviasinya sebesar Rp 462,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya, yang menunjukkan bahwa fluktuasi belanja daerah dalam penelitian ini tergolong kecil. Nilai tertinggi belanja daerah adalah Rp 2,710,000 dan nilai terendahnya sebesar Rp 341,000 dengan jumlah observasi sebanyak 138 observasi.

Selanjutnya, nilai rata-rata DAU sebesar Rp 527,000 dengan nilai standar deviasinya sebesar Rp 149,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel DAU memiliki rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya, yang menunjukkan bahwa fluktuasi data DAU dalam penelitian ini tergolong dalam fluktuasi yang kecil. Nilai tertinggi DAU sebesar Rp 872,000 dan nilai terendahnya sebesar Rp 341,000 dengan jumlah observasi sebanyak 138 observasi.

DAK memiliki nilai rata-rata sebesar Rp Rp 128,000 dengan standar deviasinya sebesar Rp 91,400. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DAK memiliki nilai rata-rata di atas nilai standar deviasinya, yang artinya fluktuasi data DAK dalam penelitian ini tergolong dalam fluktuasi yang kecil. Nilai DAK tertinggi dalam penelitian ini sebesar Rp 397,000 dan nilai DAK terendah sebesar Rp 27,300 untuk 138 observasi.

PAD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp Rp 104,000 dengan standar deviasinya sebesar Rp 91,900. Nilai tersebut menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai rata-rata di atas nilai standar deviasinya, yang artinya fluktuasi data PAD dalam penelitian ini tergolong dalam fluktuasi yang kecil. Nilai PAD tertinggi dalam penelitian ini sebesar Rp 738,000 dan nilai PAD terendah sebesar Rp 8,290 untuk 138 observasi.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan tahapan pengujian untuk melihat hubungan (korelasi) dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil analisis korelasi dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2

Analisis Korelasi

	LNBD	LNDAU	LNDAK	LN PAD
LNBD	1.0000			

LNDAU	0.8855	1.0000			
	(22.2356)***	-----			
LNDK	0.7206	0.4785	1.0000		
	(12.1213)***	(6.3556)***	-----		
LNPA	0.7342	0.7359	0.4412	1.0000	
	(12.6133)***	(12.6766)***	(5.7347)***	-----	

Sumber : Data Diolah, 2020
Keterangan : ***, **, * signifikan pada level 1%, 5% dan 10%

Berdasarkan Tabel 2 di atas, DAU, DAK dan PAD berkorelasi positif dengan belanja daerah masing-masing sebesar 0.8855; 0.7206 dan 0.7342 serta tergolong signifikan di level 1%. Untuk hubungan antar variabel bebas, terlihat bahwa DAK dan PAD berkorelasi positif dengan DAU, dengan nilai korelasi masing-masing sebesar 0.4785 dan 0.7359 serta tergolong signifikan di level 1%. Adapun PAD berkorelasi positif dengan DAK sebesar 0.4412 dan signifikan di level 1%.

Teknik Pemilihan Model

Agar model yang digunakan baik dan sesuai, maka diperlukan penaksiran model. Terdapat tiga model di dalam regresi data panel yaitu Common Effect Model (CEM) atau Pooled Least Square, Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model terbaik dan yang sesuai dengan penelitian ini, maka uji yang dilakukan yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model CEM dan FEM sedangkan Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan FEM dan REM.

Tabel 3

Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.4736	(22,112)	0.0010
Cross-section Chi-square	54.6507	22	0.0001

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa nilai Probability Chi Square sebesar 0.001, dimana nilai tersebut berada di bawah nilai toleransi kesalahan di dalam penelitian ini (0.05). Dengan kata lain, hasil Uji Chow memilih Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik, sehingga dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menguji model terbaik antara FEM dan REM.

Tabel 4

Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	16.6202	3	0.0008

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 di atas, ditemukan nilai probability sebesar 0.0008, dimana nilai tersebut berada di bawah nilai toleransi kesalahan dalam penelitian ini (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM),

Estimasi Regresi Linear Berganda

Hasil pemilihan model menunjukkan bahwa model yang tepat untuk diestimasi dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Adapun hasil regresi secara Fixed Effect Model (FEM) dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Hasil Regresi Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	thitung
C	-21.5269	-4.9782***

LNDAU	1.6039	9.0412***
LNDAK	0.1632	7.2747***
LNPAD	0.0709	2.6841***
R-squared		0.9352
Adj R-squared		0.9207
F-statistic		64.6777***
Durbin-Watson		1.2709
Sumber :	Data Diolah, 2020	
Keterangan :	***, **, * signifikan pada level 1%, 5% dan 10%	

Berdasarkan hasil Fixed Effect Model yang disajikan pada Tabel 5 di atas, maka persamaan statistik yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{LNBD} = -21.5269 + 1.6039\text{LNDAU} + 0.1632\text{LNDAK} + 0.0709\text{LNPAD}$$

Selanjutnya, nilai parameter dan intersep untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6

Intersep per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Intersep	Konstanta	Intetsep Kabupaten/Kota
Aceh Barat	-0.1085	-21.5270-21.6355	
Aceh Baratdaya	0.1327	-21.5270-21.3942	
Aceh Besar	-0.1901	-21.5270-21.7171	
Aceh Jaya	0.2095	-21.5270-21.3174	
Aceh Selatan	-0.2343	-21.5270-21.7613	
Aceh Singkil	0.1303	-21.5270-21.3967	
Aceh Tamiang	0.0631	-21.5270-21.4638	
Aceh Tengah	-0.0852	-21.5270-21.6122	
Aceh Tenggara	-0.0279	-21.5270-21.5549	
Aceh Timur	-0.3160	-21.5270-21.8430	
Aceh Utara	-0.1162	-21.5270-21.6431	
Banda Aceh	-0.1374	-21.5270-21.6643	
Bener Meriah	0.1065	-21.5270-21.4205	
Bireuen	-0.3396	-21.5270-21.8665	
Gayo Lues	0.1908	-21.5270-21.3362	
Langsa	0.0595	-21.5270-21.4674	
Lhokseumawe	-0.0116	-21.5270-21.5386	
Nagan Raya	0.0750	-21.5270-21.4520	
Pidie	-0.2933	-21.5270-21.8202	
Pidie Jaya	0.1964	-21.5270-21.3305	
Sabang	0.2759	-21.5270-21.2511	
Simeulue	0.0396	-21.5270-21.4874	
Subulussalam	0.3806	-21.5270-21.1464	
Sumber :	Data Diolah, 2020		

Berdasarkan Tabel 6 di atas, nilai tersep tertinggi untuk pengujian Kabupaten/Kota ada pada Kabupaten Aceh Timur, yaitu sebesar -21.8430, sedangkan nilai intersep terendah ada pada Kota Simeulue, yaitu sebesar -21.1464. Berikut ini penjelasan intersep masing-masing Kabupaten/Kota:

1. Kabupaten Aceh Barat

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Barat bernilai konstan (no), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Barat juga akan konstan sebesar -21.6355.

2. Kabupaten Aceh Barat Daya

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Barat Daya bernilai konstan (no), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Barat Daya juga akan konstan sebesar -21.3942.

3. Kabupaten Aceh Besar

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Besar bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Besar juga akan konstan sebesar -21.7171.

4. Kabupaten Aceh Jaya

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Jaya bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Jaya juga akan konstan sebesar -21.3174.

5. Kabupaten Aceh Selatan

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Selatan bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Selatan juga akan konstan sebesar -21.7613.

6. Kabupaten Aceh Singkil

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Selatan bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Selatan juga akan konstan sebesar -21.3967.

7. Kabupaten Aceh Tamiang

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Tamiang bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Tamiang juga akan konstan sebesar -21.4638.

8. Kabupaten Aceh Tengah

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Tengah bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Tengah juga akan konstan sebesar -21.6122.

9. Kabupaten Aceh Tenggara

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Tenggara bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Tenggara juga akan konstan sebesar -21.5549.

10. Kabupaten Aceh Timur

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Tenggara bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Tenggara juga akan konstan sebesar -21.8430.

11. Kabupaten Aceh Utara

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Aceh Utara bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Aceh Utara juga akan konstan sebesar -21.6431.

12. Kota Banda Aceh

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kota Banda Aceh bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kota Banda Aceh juga akan konstan sebesar -21.6643.

13. Kabupaten Bener Meriah

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Bener Meriah bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Bener Meriah juga akan konstan sebesar -21.4205.

14. Kabupaten Bireuen

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Bireuen bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Bireuen juga akan konstan sebesar -21.8665.

15. Kabupaten Gayo Lues

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Bireuen bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Bireuen juga akan konstan sebesar -21.3362.

16. Kota Langsa

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kota Langsa bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kota Langsa juga akan konstan sebesar -21.4674.

17. Kota Lhokseumawe

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kota Lhokseumawe bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kota Lhokseumawe juga akan konstan sebesar -21.5386.

18. Kabupaten Nagan Raya

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Nagan Raya bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Nagan Raya juga akan konstan sebesar -21.4520.

19. Kabupaten Pidie

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Pidie bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Pidie juga akan konstan sebesar -21.8202.

20. Kabupaten Pidie Jaya

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Pidie Jaya bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Pidie Jaya juga akan konstan sebesar -21.3305.

21. Kota Sabang

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kota Sabang bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kota Sabang juga akan konstan sebesar -21.2511.

22. Kabupaten Simeulue

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kabupaten Simeulue bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kabupaten Simeulue juga akan konstan sebesar -21.4874.

23. Kota Subulussalam

Apabila DAU, DAK dan PAD pada Kota Subulussalam bernilai konstan (nol), maka belanja daerah untuk Kota Subulussalam juga akan konstan sebesar -21.1464.

Setelah membahas intersep dari setiap Kabupaten/Kota yang diuji, selanjutnya akan diinterpretasikan nilai parameter pada Tabel 5.6. DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah dengan koefisien sebesar 1.6039. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika DAU naik 1%, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 1.6039%. Nilai koefisien tersebut juga tergolong signifikan di level 1%. Dengan kata lain, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sehingga H1 diterima.

Selanjutnya, DAK memiliki koefisien positif sebesar 0.1632. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika DAK naik 1%, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0.1632%. Nilai koefisien tersebut juga tergolong signifikan secara statistik di level 1%. Ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sehingga H2 diterima. Adapun PAD memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.0709, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa ketika PAD naik 1%, maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0.0709%. Nilai tersebut juga tergolong signifikan secara statistik di level 1%, yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sehingga H1 diterima.

Pada Tabel 5 di atas, nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0.9207, artinya DAU, DAK dan PAD mampu menjelaskan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebesar 92.07%, sedangkan sisanya (7.93%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 5, nilai F-statistik sebesar 64.6777 dan nilai tersebut tergolong signifikan secara statistik di level 1%. Dengan Kata lain, DAU, DAK dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Pengujian Flypaper Effect

Untuk melihat flypaper effect pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat dilihat dari nilai koefisien DAU, DAK dan PAD dalam merespon belanja daerah. Adapun hasil pengujian flypaper effect disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7

Rekapitulasi Hasil Pengujian Flypaper Effect

Kab/Kot	FE & DAU	FE & DAK
Aceh Barat	ADA	ADA
Aceh Barat daya	ADA	TIDAK ADA
Aceh Besar	ADA	ADA
Aceh Jaya	ADA	TIDAK ADA
Aceh Selatan	ADA	ADA
Aceh Singkil	ADA	TIDAK ADA
Aceh Tamiang	ADA	TIDAK ADA
Aceh Tengah	ADA	TIDAK ADA
Aceh Tenggara	ADA	TIDAK ADA
Aceh Timur	ADA	ADA
Aceh Utara	ADA	ADA
Banda Aceh	ADA	ADA
Bener Meriah	ADA	TIDAK ADA
Bireuen	ADA	TIDAK ADA
Gayo Lues	ADA	ADA
Langsa	ADA	TIDAK ADA
Lhokseumawe	ADA	TIDAK ADA
Nagan Raya	ADA	ADA
Pidie	ADA	TIDAK ADA
Pidie Jaya	ADA	TIDAK ADA
Sabang	ADA	TIDAK ADA
Simeulue	ADA	ADA
Subulussalam	ADA	TIDAK ADA

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5.9 di atas, flypaper effect untuk perbandingan DAU dan PAD untuk 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh seluruhnya memiliki koefisien DAU lebih tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien PAD dalam merespon belanja daerah. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terjadi flypaper effect pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Akan tetapi, jika melihat hasil perbandingan antara DAK dengan PAD, hanya ada beberapa daerah yang memiliki koefisien DAK lebih besar dari pada PAD, yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Gayo Lues, Nagan Raya dan Simeulue. Hal ini menunjukkan bahwa DAK merespon belanja modal lebih tinggi dibandingkan dengan PAD, sehingga terjadi flypaper effect pada Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Gayo Lues, Nagan Raya dan Simeulue, sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak terjadi flypaper effect untuk perbandingan DAK dan PAD.

Pembahasan

Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ketika DAU meningkat, maka belanja daerah akan meningkat. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa DAU merupakan prediktor dalam meningkatkan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang telah membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Ernaya, 2017; Rasyid, 2018; Syamni & Ichsan, 2018). Penelitian ini membuktikan bahwa DAU dapat menjadi alat yang dapat meningkatkan belanja daerah. DAU sendiri merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Awaniz, 2011). DAU memberikan dampak pada peningkatan belanja daerah (Rasyid, 2018). DAU yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki desentralisasi fiskal yang baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik melalui pengeluaran daerah (dalam hal ini belanja daerah) (Lestari et al. 2016). Pada umumnya, DAU banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah. Belanja pegawai sendiri tergolong dalam langsung daerah. Tingginya kucuran belanja pegawai yang diberikan daerah membuat pelayanan daerah dan pekerjaan-pekerjaan rumah daerah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Hal ini membuat proyek-proyek daerah yang dijalankan oleh pegawai dapat optimal dan mampu meningkatkan belanja daerah. Uraian tersebut menunjukkan bahwa DAU memberikan dampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAK, akan memberikan dampak pada kenaikan belanja daerah. Sementara itu, hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa DAK merupakan prediktor dalam meningkatkan belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang telah membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Syamni & Ichsan, 2018; Ferdiansyah et al., 2018; Salawali et al., 2016).

Pengaruh positif DAK terhadap belanja daerah dapat memberikan penjelasan DAK yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan belanja daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui pengeluaran-pengeluaran daerah. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong percepatan pembangunan daerah (Hairiyah, 2018). Ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Salawali et al. (2016), dimana peningkatan DAK mendorong pada peningkatan belanja daerah.

DAK biasanya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur-infrastruktur publik, seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan daerah. Hal ini tentunya berkaitan dengan belanja barang dan jasa yang menjadi salah satu komponen belanja langsung daerah. Ketika daerah mendapatkan DAK yang lebih tinggi dari pemerintah pusat, maka pemerintah akan mengeluarkannya pada pos belanja barang dan jasa, sehingga hal tersebut membuat kucuran belanja daerah meningkat. Dengan adanya perencanaan yang baik dari pihak pemerintah daerah, maka DAK akan dapat dioptimalisasikan pada infrastruktur-infrastruktur yang potensial sehingga kesejahteraan rakyat meningkat dengan adanya belanja daerah tersebut.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD di suatu daerah akan mendorong pada peningkatan belanja daerah. Sementara itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa PAD merupakan prediktor yang dapat meningkatkan belanja daerah. Beberapa studi sebelumnya juga telah membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (Mawarini & Abdullah, 2013; Mangowal, 2013; Syamni & Ichsan, 2018).

PAD menjadi alat yang tepat untuk membiayai kegiatan pengeluaran daerah (khususnya di bidang infrastruktur) agar ketergantungan daerah dengan transfer pusat dapat berkurang (Wandira, 2013). PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi

daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah mampu memberikan dampak baik pada tingkat investasi daerah. Memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya pada daerah yang nantinya akan menambah PAD. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi tentunya daerah yang mandiri dan mampu memanfaatkan potensinya untuk menambah kas daerah. Dalam hal tersebut, dibutuhkan belanja daerah untuk mengembangkan potensi-potensi daerah tersebut, sehingga anggaran belanja daerah tentunya meningkat, dimana belanja daerah dapat dikururkan pada aspek peningkatan infrastruktur dalam kaitannya dengan PAD.

Pengujian Flypaper Effect

Deteksi yang digunakan untuk melihat suatu daerah terjadi flypaper effect atau tidak yaitu dengan melihat dari besaran slope yang diberikan oleh dana transfer dengan pendapatan asli daerah dalam merespon belanja daerah (Zulfan & Mustika, 2018; Zulfan & Maulana, 2019). Secara overall, terlihat bahwa koefisien DAU dan DAK jauh lebih tinggi dibandingkan koefisien PAD dalam mempengaruhi belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadi flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, artinya daerah-daerah di Provinsi Aceh lebih dominan menggunakan dana transfer pusat dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Untuk hasil per wilayah, ditemukan bahwa DAU merespon belanja daerah lebih tinggi dibandingkan PAD, artinya terjadi flypaper effect untuk 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sedangkan pada perbandingan koefisien DAK dengan PAD per wilayah, hasil estimasi menunjukkan bahwa flypaper effect hanya terjadi di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Gayo Lues, Nagan Raya dan Simeulue.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat flypaper effect terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ini juga memberikan bukti bahwa Aceh belum mandiri dalam menjalankan roda perekonomiannya, dikarenakan pengeluaran-pengeluaran daerah masih banyak didorong oleh dana transfer pusat. Dana transfer pusat yang begitu tinggi juga membuat daerah-daerah di Aceh menjadi nyaman, sehingga kurang bertindak dalam melakukan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Flypaper effect yang begitu tinggi juga menyebabkan daerah-daerah menjadi ketergantungan dengan dana pusat, yang membuat daerah tersebut menjadi tidak mandiri secara finansial.

Jika dana perimbangan diprosikan dengan DAU, maka seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terjadi flypaper effect. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa seluruh daerah di Provinsi Aceh cenderung bergantung dengan DAU dalam mendanai belanja modal dibandingkan dengan PAD. DAU sendiri sering digunakan untuk belanja pegawai, yang merupakan salah satu item dari pengeluaran daerah. Akan tetapi, jika DAU lebih cenderung digunakan dalam membangun daerah, maka hal tersebut akan membuat pihak pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh menjadi ketergantungan dengan dana pusat, sehingga membuat pemerintah daerah melupakan potensi-potensi daerah, sehingga PAD terus menurun. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan daerah menjadi tidak mandiri.

Selanjutnya, flypaper effect untuk perbandingan DAK dengan PAD hanya terjadi di Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Utara, Banda Aceh, Gayo Lues, Nagan Raya dan Simeulue. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil daerah di Aceh yang sangat bergantung dengan DAK dari pada PAD. DAK pada umumnya lebih digunakan untuk kegiatan/kegiatan khusus yang lebih mengutamakan prioritas nasional, sehingga dalam pembangunan, tidak terlalu bergantung pada DAK (sebagai proksi dana perimbangan). Hal inilah yang menyebabkan flypaper effect untuk DAK hanya terjadi di beberapa daerah saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, artinya kenaikan DAU akan mendorong belanja daerah semakin meningkat.
2. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, artinya kenaikan DAK akan mendorong belanja daerah semakin meningkat.
3. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, artinya kenaikan PAD akan mendorong belanja daerah semakin meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga disarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan optimalisasi pada penggunaan DAU dalam belanja dan tidak terlalu boros dalam belanja untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
2. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga disarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk menggunakan DAK sebaik mungkin dalam pengeluaran daerah dengan membuat program-program khusus yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sehingga disarankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan dan menggali lagi potensi-potensi daerah yang dapat menghasilkan PAD, agar kemandirian keuangan daerah dapat tercapai.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja daerah agar dapat memberikan kontribusi di bidang manajemen keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizawati, (2012). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Sumatra Selatan. *Journal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi* Vol 2 No 1.
- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan PDRB Terhadap Belanja Daerah Di Kab/Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu EKonomi JIE*, 2(1), 1-13.
- Aprilla, Nila dan Redo Arian Saputra (2013). Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vo. 3 No.2.
- Awaniz, Berlian Nur. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Eks Karesidenan Pekalongan. *Jurnal Keuangan Daerah*. Vol 1. No 2.
- Azwar, A., Hamzah, A., Masbar, R., & Syahnur, S. (2013). Economic Growth Disparity Among the Regions in Aceh, Indonesia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 2(1).
- Bastian, Indra (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta.
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Baltagi, B.H. (2008). *Econometrics*. Fourth Edition. Spinger. Heidelberg.
- Bastian, Indra (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba. Jakarta.
- Dagun, S. M (1992). *Maskulin dan Feminin: Perbedaan Pria-Wanita Dalam Fisiologis dan Psikologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks, Jakarta
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43-52.
- Fajar, Nugroho, dan Abdul Rohman. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1, No 2.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44-52.
- Frediyanto, Yanuar (2010). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal EMBA*. Vol 1. No 2.
- Gujarati dan Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat, Jakarta.
- Gorodnichenko, Y (2001). *Effects of Intergovernmental Aid on Fiscal Behavior of Local Governments: The Case of Ukraine*, Master Thesis, University of Kiev.
- Gramlich, E.M (1977). *Intergovernmental Grants: A Review of the Empirical Literature*, W.E. Oates, (Ed.), *The Politic Economy of Fiscal Federalism*, Lexington Books, Lexington MA.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryani, H. (2017). Analisis Flypaper Effect Pada Pemerintah Provinsi Aceh. *Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2).
- Hapid, H., Halim, M., & Wulandari, Y. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2018). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *KINERJA*, 14(2), 85-91.
- Hediyanto, Lino dan Rahayu, Sri, (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Bandung Periode 2008-2012. *e-Proceeding of Management*. Vol.1, No.3.

- Hendarmin (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EMBA* Vol. 8 ISSN 1693–9093.
- Inayati, Nur Isna (2014). Fenomena Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 2.
- Indriansyah (2017). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(10).
- Indraningrum, Try (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Skripsi.
- Junaidi. (2012). “Jakarta Asimetri pada Flypaper Effect (Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia)”. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 14 No. 1.
- Kaho, Josef Riwu (1995). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koswara E., (2001) Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan kemandirian Rakyat. Yayasan Pariba, Jakarta.
- Kusumadewi, Diah Ayu & Arief Rahman. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI*. Vol. 11 No. 1.
- Lambut, . Adventinus dan Budiarmo, Novi (2012). “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Journal Accountability*. Vol. 2 No.1.
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2017). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan kemandirian keuangan Daerah provinsi sulawesi tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 1(2), 44-55
- Mentayani, I., Hayati, N., dan Rusmanto (2012). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal SPREAD*. Vol. 2.No.1.
- Mangowal, J. C. (2013). Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara. (2006). Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 4 No. 2.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo dan Makhfatih, Ahmad (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*, Laporan Akhir. Yogyakarta.
- Mawarni, D., & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi ISSN*, 2302, 0164.
- Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2017). Dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Aceh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Muluk. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 1985–2010*. Publikasi Ilmiah Universita Muhammadiyah Surakarta.
- Nailufar, F., & Sufitrayati, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Nur, Muhammad (2015). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi di Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 16. ISSN: 1979-231X.
- Naganathan, M. dan K.J. Sivagnanam. (1999). *Federal Transfer And Tax Efforts Of States In India*. *Indian Economic Journal*, Vol. 47 No. 4.
- Oktavia, D (2014). Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2003-2013, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, vol. 1. No. 2.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*. Vol. 8 No. 2.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2015). Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 811-827.
- Rasyid, M. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 2. No 1.
- Riduwan dan Kuncoro. (2008). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur*. Alfabeta. Bandung.

- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. (2016). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Sarwono, Jonathan. (2016). *Prosedur-Prosedur Analisis Popules Aplikasi Riset Skripsi dan Tesis dengan Eviews*. Gava Media, Yogyakarta
- Sekaran, Uma (2007). *Research Methods for Business*. Salemba Empat. Jakarta
- Shah, Anwar. (1994). *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relation in Developing and Emerging Market economics*. Policy and Research Series 23. The World Bank.Washington DC.
- Syukry & Halim (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali). *SNA*. VI.
- Sofiyanda, D. & Ikhsan, M. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pengeluaran belanja daerah dengan DBH sebagai variabel moderator. (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Publik*. 2(1).
- Simanjuntak, L., Subeki, A., Ferina, I. S., & Yusrianti, H. (2013). Analysis of Flypaper Effect in General Allocation Fund and Regional Original Income to Regional Expenditure of Districts and Cities in South Sumatera. *Jurnal Akuntansi Publik*. Vol 1. No 2.
- Sidik, Mahfud et. al (2002). *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan,dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Buku Kompas. Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 14, No. 1.
- Suparmoko, M (2002). *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Sidik, et. al., (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Kompas. Jakarta.
- Silalahi, et al (1995). *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. PT Sinar Agape Prese. Jakarta.
- Syamni, G. & Ichsan (2018). The Determinants of Districts/Cities Spending in Aceh Province: An Analysis of Electoral Districts. *The Journal of Social Sciences Research*, 295-298.
- Suyanto, S. (2015). Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 69-92.
- Untung, Joko et al (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika*. Vo. 1 No. 2.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Wahyuni, S.E. & Supheni, I (2017). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *Jurnal UST Jogja*.Vol. 1 No. 2.
- Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Walidi. (2009). Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan per Kapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*. Vol 1. No 1.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Zulfan, T., & Mustika, E. (2018). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Fly paper effect di Provinsi Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 2(1), 19-27.
- Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala fly paper effect di provinsi Aceh ditinjau dari dana alokasi umum dan dana otonomi khusus. *INOVASI*, 15(2), 188-197.

Peraturan & Undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.